

BAB III

KEPEMIMPINAN KH. IBRAHIM DI MUHAMMADIYAH

A. KH. Ibrahim Di Muhammadiyah

KH. Ibrahim seorang ulama Muhammadiyah, tumbuh dalam lingkungan keluarga Muhammadiyah. Secara umum, penggantian KH. Ahmad Dahlan oleh KH. Ibrahim menyebabkan timbulnya radikalisme dalam Muhammadiyah dan peningkatan eksklusivitas yang lebih besar. Sebagai contohnya, di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim, praktik pertukaran keluarga Muhammadiyah dilakukan. Namun, di bawah kepemimpinan ini, Muhammadiyah mengalami kemajuan pesat. Organisasi ini mulai tumbuh di berbagai daerah, dan kongres tahunan Muhammadiyah diadakan di berbagai kota, seperti Muktamar ke-16 di Pekalongan, Muktamar ke-17 di Solo, Muktamar ke-18 di Yogyakarta, Muktamar Nasional ke-19 (1930) di Bukittinggi, Sumatera, dan Muktamar ke-21 (1931) di Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar ke-22 di Semarang juga menjadi bagian dari perkembangan ini.¹

Dari kelima tokoh pemimpin Muhammadiyah, tiga di antaranya, yaitu KH. Ahmad Dahlan, KH. Ibrahim, dan KH. Mas Mansur, mengambil kesempatan untuk menimba ilmu di Timur Tengah. Selain mengikuti pendidikan di pesantren tradisional di Jawa, mereka juga membuka horizon pendidikan internasional dengan belajar di wilayah Timur Tengah. Penggabungan pendidikan tradisional dari berbagai pesantren di Jawa dengan pengetahuan yang lebih luas yang diperoleh di Timur Tengah memperkuat pemahaman dan keterampilan keagamaan mereka, yang kemudian berguna dalam memimpin organisasi Muhammadiyah.²

¹Dr. Suaidi Asyari, *Nalar Politik Nu Dan Muhammadiyah : Over Crossing Jawa Sentris*, (Yogyakarta: Lkis, 2009), Hlm. 56

²Agus Miswanto, Peran Pesantren Dalam Melahirkan Kepemimpinan Muhammadiyah: Analisis Historis Terhadap Profil Ketu Umum Pimpinan Pusat Tahun 1912-2020, *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol.11 No.02, (2020). Hlm.35

Setelah kematian KH. Ahmad Dahlan, kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh KH. Ibrahim sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam periode kedua. Di bawah pimpinan K.H. Ibrahim, Muhammadiyah mengalami kemajuan pesat dengan pendirian cabang-cabang di berbagai wilayah Indonesia. Ibrahim memiliki tekad agar Muhammadiyah tidak hanya berkembang di Yogyakarta, termasuk dalam penyelenggaraan kongres, muktamar, dan pertemuan penting lainnya. Sejak tahun 1923, lokasi penyelenggaraan kongres besar Muhammadiyah selalu berpindah-pindah, mencakup Surabaya, Pekalongan, Solo, Semarang, Bukittinggi, dan bahkan Makassar. Hal ini bertujuan untuk memperluas penyebaran Muhammadiyah di seluruh wilayah Hindia-Belanda Indonesia.

1. Organisasi dan Otonomi Yang berdiri di masa KH.Ibrahim

Sebagai organisasi social keagamaan yang telah cukup lama berdiri, sepeninggal tokoh pendiri organisasi, Muhammadiyah pernah dipimpin oleh beberapa pemimpin organisasi. Masing-masing pemimpin dalam setiap kurun waktu kepemimpinan memiliki karakteristik tersendiri yang berimbas pada penekanan dan variasi formulasi program serta aktivitas organisasi. Terlebih, setiap kurun waktu yang dihadapi oleh organisasi social keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, tentu saja memiliki tantangan dan persoalan tersendiri sesuai konteks perkembangan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu logis jika pada perkembangan kepemimpinan masing-masing organisasi social keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, memiliki pola-pola tertentu. Lalu bagaimana pola kepemimpinan yang terdapat pada organisasi Muhammadiyah, maka sangat diperlukan dilakukan suatu penelitian yang dapat mengungkap mengenai hal tersebut. Pustaka tentang Muhammadiyah, sekurang-kurangnya, dapat dipilahkan dalam lima kategori. Kelima kategori tersebut adalah :

- a. umum atau kapita selekta
- b. Pendidikan
- c. pembaruan atau pemurnian

- d. pemikiran, dan
- e. politik.

Kajian tentang pergeseran kepemimpinan di Muhammadiyah dekade 1990-2000 dan pengaruhnya bagi konstelasi politik nasional, termasuk dalam kategori politik. KH. Ibrahim adalah tokoh muhammadiyah yang sempat memimpin muhammadiyah pada masa itu, dan meninggal pada tahun 1932, sedangkan Nahdatul Ulama berdiri pada tahun 1926.

Meskipun menjabat sebagai pemimpin utama Muhammadiyah yang memiliki puluhan ribu anggota, Ibrahim tidak terlalu memperlihatkan gengsi yang tinggi. Sebaliknya, ia dengan tulus turun ke lapangan, memberikan perhatian dan panduan langsung kepada para kader Muhammadiyah di berbagai daerah. K.H. Ibrahim juga menunjukkan minat besar terhadap angkatan muda dan organisasi sayap perempuan Muhammadiyah.³ Sebagai perkembangan dari dua organisasi otonomi Muhammadiyah tersebut, kepemimpinan pusat di bawah kendali K.H. Ibrahim mendirikan Pemuda Muhammadiyah untuk kaum remaja laki-laki dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) untuk kaum remaja perempuan. Kedua organisasi pemuda Muhammadiyah ini masih aktif hingga saat ini.

K.H. Ibrahim menunjukkan perhatian besar terhadap pemuda dan perempuan. Beliau memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Aisyah dan Hizbul Wathan, dua organisasi dalam Muhammadiyah pada masa itu. Selain itu, K.H. Ibrahim memimpin kelompok pengajian yang disebut Adz-Dzakariat. Melalui Adz-Dzakariat, usaha pengumpulan dana dilakukan untuk mendukung aktivitas Aisyiyah, PKO, bagian Tabligh, dan bagian Taman Pustaka. Dengan didirikannya Majelis Tarjih pada tahun 1927 sebagai hasil keputusan dari kongres ke-17 yang dipimpin oleh K.H. Ibrahim, tujuannya adalah untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Konsep ini selalu menjadi perhatian utama bagi Kyai Ahmad Dahlan, karena menurutnya, persatuan umat Islam harus dimulai dengan

³ Nur Ahmad & Pramono Tantowi, *Muhammadiyah "Digugat": Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah*, (Raja Grafindo Persada 2000).Hlm. 67

menyatukan pemikiran tentang agama Islam, termasuk pemahaman yang benar tentang ajaran-ajaran agama Islam.⁴

Pada awal abad ke-20, terjadi lonjakan jumlah organisasi pergerakan yang dibentuk oleh kaum pribumi. Meskipun munculnya ini bertujuan untuk memajukan kehidupan mereka, setiap organisasi memiliki identitas dan pendekatan perjuangan yang berbeda. Sebagian memilih jalan kompromi dengan pemerintahan Hindia Belanda (kooperatif), sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih radikal (non-kooperatif). Salah satu kelompok yang merespons situasi internasional dengan aktif, terutama terkait dengan peristiwa di Turki, adalah organisasi Islam. Dalam konteks ini, Sarekat Islam muncul sebagai organisasi Islam yang paling menonjol dan mendapat perhatian khusus dalam perbincangan masa khalifah. Pada tanggal 7 Desember 1924, Kongres Al-Islam III di Surabaya membahas undangan dari Komite Khalifat Islam Mesir untuk menghadiri Kongres Dunia Islam. Agenda kongres ini termasuk mendirikan Khilafat Dunia Islam setelah Presiden Turki, Mustafa Kemal, menghapuskan Khilafat Islamiyah. Namun, rencana Kongres Dunia Islam tersebut kemudian dibatalkan karena pecahnya konflik antara Ibnu Sa'ud dan Syarif Husein, yang menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut.⁵

Pada tahun 1924, Ibrahim mendirikan Fonds Dachlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin dan berdirinya panti asuhan pertama. Pada tahun 1925, ia juga mengadakan khitanan massal.⁶ Di samping itu, ia juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar disebarluaskan ke luar Jawa. Pada

periode kepemimpinan Ibrahim, Muhammadiyah sejak tahun 1928 mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah (Muallimin,

⁴ Yanto Bashri Dan Retno Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa*, (Yogyakarta: Pt Lkis Printing Cemerlang, 2004), Hlm.349

⁵ Septian Anto Waginugroho, Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924-1927, *Jurnal Of Islamic Studie*, Vol.02 N0.01 (2023). 22

⁶ Dr.H. Muchlas, M.T, *100 Tokoh Muhammadiyah Yang Menginspirasi*, (Yogyakarta: 2014), Hlm.12

Muallimat, Tabligh School, Normaalschool) ke seluruh pelosok tanah air, yang kemudian di kenal dengan “anak panah Muhammadiyah”.⁷

Pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, Kyai Haji Mas Mansur mengusulkan pembentukan lembaga atau majelis ulama yang disebut Majelis Tarjih. Fungsinya adalah untuk membahas isu-isu agama, memberikan kepastian hukum terkait ibadah dan muamalah. Usulan ini muncul karena ada kekhawatiran akan konflik dan perpecahan dalam Muhammadiyah terkait masalah agama. Kyai Haji Mas Mansur juga khawatir akan munculnya penyimpangan dari ajaran agama karena fokus pada hal-hal dunia dan melupakan tujuan asli Muhammadiyah. Ide ini mendapat tanggapan positif dari Muhtamirin, dan akhirnya, sebuah panitia khusus dibentuk untuk merumuskan Majelis Tarjih. Sebagai hasilnya, Majelis Tarjih diakui sebagai salah satu keputusan Kongres Muhammadiyah. Setelah itu, sebuah panitia perumus dibentuk untuk merancang aturan dan struktur pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun yang sama, Sultan Mansur dan Fakhruddin aktif melakukan tabligh dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh.⁸

Pada Muktamar ke-17 Muhammadiyah di Solo pada tahun 1928, yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mendirikan Uitgeefster My. Ini adalah badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah yang berada di bawah Bahagian Taman Pustaka. Saat itu, terjadi penurunan citra KH. Ahmad Dahlan karena muncul gejala pengkultusan terhadapnya. Di sisi lain, dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makasar tahun 1932, diputuskan bahwa Muhammadiyah akan menerbitkan surat kabar bernama Adil. Pelaksanaannya diberikan kepada Pengurus Muhammadiyah Cabang Solo. Jika KH. Ahmad Dahlan dikenal sebagai "Sang Penecerah" (1912-

⁷ Drs. H. Slamet Abdullah, Ma Dan Dr. H.M Muslich Ks,M.Ag, *Seabad Muhammadiyah Dalam Kumpulan Budaya Nusantara*”, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2010), Hlm. 102.

⁸ Sofyan Hnafi Dan Kuswanto, “Kiprah Dan Perjuangan Kyai Haji Mas Mansur Dalam Perserikatan Muhammadiyah Pada Tahun 1916-1946”, *Jurnal Swarnadwipa Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 03,(2020). Hlm.149

1923), pendiri Muhammadiyah, maka KH. Ibrahim dijuluki "Sang Penyabar". Kepemimpinan beliau berhasil membawa Mukhtar keluar dari Yogyakarta.⁹

Mukhtar di Makassar berlangsung dengan sukses, diakui sebagai contoh yang patut diikuti dan harus menjadi pemicu untuk mengembangkan semangat, pemikiran, serta suasana Islam yang progresif. Pemikiran program, baik itu dalam konteks dakwah komunitas maupun negara Pancasila sebagai "Dar Al-Ahdi Wa Syahadah," serta isu-isu strategis yang diambil keputusannya dalam mukhtar, mencerminkan pandangan Islam yang berkembang pesat. Semua ini mencerminkan semangat orang-orang Muhammadiyah untuk mendorong gerakan maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peran mereka dalam kebangsaan. Lebih jauh, Muhammadiyah perlu mampu membuktikan keberhasilannya tanpa perlu mengandalkan retorika yang berlebihan mengenai model pergerakan Islam dalam kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan secara umum.¹⁰

Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi Sumatera Barat pada tahun 1930, ia menyampaikan dalam bahasa Arab yang fasih. Dalam memberikan pelajaran agama/ngaji, KH.Ibrahim menggunakan metode *sorogan & weton*. Metode sorogan adalah cara mengaji dengan mengajari seorang demi seorang yang dilakukan antara jam 07.00 hingga jam 09.00. sedangkan metode weton adalah cara mengaji dimana Kyai membaca kitab tertentu dan di jelaskan, sedangkan santri mendengarkan dan memperhatikan melalui kitab masing-masing yang dilakukan pada sore hari ba'da ashar.¹¹

KH Ibrahim menduduki jabatan Ketua Kongres Muhammadiyah sebanyak sepuluh kali selama masa kepemimpinannya. Selama periode

⁹ M. Muchlas Abror. "Suara Muhammadiyah: Tiga Kali Mukhtar Di Makassar", 21 Maret 2020, Di Kutip Dari Website <https://Web.Suaramuhammadiyah.Id/2020/02/15/Kilas-Balik-Tiga-Kali-Mukhtar-Di-Makassar/> Tanggal 20-02-2024, Pukul 13.47

¹⁰ Abdul Mu'ti Dan Dkk, "Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Mukhtar Teladan Ke-47 Muhammadiyah Di Makassar 2015", (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2016), Hlm.8

¹¹ Majelis Pusaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit*, Hlm.12

tersebut, ia memberikan lebih banyak ruang kepada generasi muda untuk mengungkapkan diri dalam kegiatan dakwah Muhammadiyah. Selain itu, ia berhasil membimbing kemajuan, ketertiban, dan kekuatan gerakan Aisyiyah. Keberhasilannya juga mencakup peningkatan kualitas pengelolaan masjid (takmirul masjid) dan dorongan pendirian Koperasi Adz-Dzakirat. Dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendidikan untuk penduduk pribumi, Kyai Ibrahim turut bergabung dengan Politieke Economische Bond (PEB), sebuah organisasi yang dibentuk oleh persatuan pabrik gula yang dimiliki oleh Belanda.

Tujuan PEB adalah untuk mengoordinasikan dan meningkatkan kerjasama antar-pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal produksi, pemasaran, serta aspek sosial-budaya yang terkait dengan politik-ekonomi pabrik gula. PEB mendirikan sebuah perkumpulan bernama Jam'iyatul Hasanah dengan maksud mengumpulkan guru agama dan mendukung mereka dalam mengajarkan Islam kepada buruh di pabrik gula. Meskipun beberapa orang mengkritik Muhammadiyah yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda saat itu dan menyebutnya sebagai antek Belanda, tetapi fitnah tersebut dapat diatasi melalui transparansi kepemimpinan KH. Ibrahim.

Beliau membuka diri dengan mengundang utusan dari cabang-cabang Muhammadiyah untuk memeriksa keuangan dan notulensi rapat di Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Kemampuan kepemimpinan Kyai Ibrahim dalam membawakan Muhammadiyah pada waktu itu melebihi batas pemikiran umum sehingga peran strategis Muhammadiyah dianggapnya sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa sendiri demi mencapai tujuan bersama, yakni kemerdekaan.¹²

Selama masa pemerintahan KH Ibrahim, sepuluh kali Rapat Tahunan Muhammadiyah diadakan secara berkesinambungan, yang secara konsisten

¹² Tim Museum Muhammadiyah, Muhammadiyah Dalam Narasi Museum, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Dan Informasi, 2022), Hlm. 62

menunjuknya sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Mulai tahun 1926, istilah Rapat Tahunan Muhammadiyah diganti menjadi Kongres Muhammadiyah, dengan Kongres Muhammadiyah ke-5 diselenggarakan di Surabaya. Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928 mengalami sedikit ketegangan, terutama terkait permintaan untuk menurunkan gambar Kyai Haji Ahmad Dahlan dari dinding. Permintaan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah kedua, yang juga merupakan penerus Ahmad Dahlan, yaitu KH Ibrahim.

Alasan di balik permintaan tersebut bukanlah kurang menghormati pendiri Muhammadiyah, melainkan keinginan untuk menghindari pemujaan berlebihan terhadap Ahmad Dahlan, yang dianggap sebagai gejala yang tidak diinginkan. KH Ibrahim memiliki alasan tertentu dan bukan karena kurang menghormati, melainkan untuk mencegah pemujaan berlebihan karena hal tersebut sudah mulai tampak. Muhammadiyah, di bawah kepemimpinan KH Ibrahim, tetap berpegang pada tujuan utamanya, yaitu menegakkan ajaran Islam dengan merujuk pada Alquran dan Hadis, serta menegakkan kebenaran dan menghindari penyimpangan. Oleh karena itu, pengkultusan terhadap siapapun dihindari, dan hal tersebut selalu menjadi perjuangan KH Ibrahim sebagai penerus dari Sang Pencerah.¹³

2. Perluasan Wilayah Muhammadiyah pada Masa KH. Ibrahim

Pada masa pemerintahan K.H. Ibrahim, Muhammadiyah mengalami perkembangan di luar Jawa, terutama di wilayah Minangkabau. Pada Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1926, organisasi ini mengambil dua keputusan penting. Pertama, Muhammadiyah memulai tradisi penyelenggaraan shalat Id di lapangan di sekitar cabang-cabang Muhammadiyah. Kedua, Muhammadiyah mulai mengadopsi kalender Hijriyah untuk keperluan surat-menyurat dan administratif, menggantikan kalender Jawa. Pada tahun 1930, usaha pendidikan Muhammadiyah telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Di khususnya di Yogyakarta,

¹³ *Ibid*, Hlm 63

sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah mencakup 3 HIS (Hollandsch-Inlandsche School), 5 Standaarschool (SD), 7 Vervolg school (Sekolah sambungan/ sekolah rakyat), 83 Volkschool (sekolah rakyat pada zaman belanda), 3 Volks onderwijzer (CVO/kursus), 2 Kweekschool (Sekolah Guru Agama), 1 Schakelschool (sekolah peralihan), dan 1 Sekolah Tenun.

Perkembangan yang lain, melalui Kongres Muhammadiyah ke-19 tahun 1930 di Minangkabau, diputuskan adanya jabatan *Consul Hoofd Bestuur* Muhammadiyah (sekarang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) sebagai penghubung antara Pengurus HB Muhammadiyah dengan cabang dan grup Muhammadiyah yang ada di bawahnya. Perkembangan selanjutnya, didirikan dua organisasi yang belakangan menjadi organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah, yakni Nasyi'atul Aisyiyah (NA) pada 1931 dan Pemuda Muhammadiyah (PM) pada 1932.¹⁴ Pada tahun 1926, Persyarikatan Muhammadiyah hadir dan resmi terbentuk pada 30 Maret 1926 di Makassar. Persyarikatan Muhammadiyah menjadi organisasi yang lahir untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Persyarikatan Muhammadiyah tidak menentang sufisme namun mengkritik berbagai ritual kelahiran, khitanan, perkawinan dan pemakaman yang sinkretis.

Sejak 1923, kongres besar Muhammadiyah selalu berpindah-pindah lokasi penyelenggaraan. Surabaya, Pekalongan, Solo, Semarang, bahkan Bukittinggi hingga Makassar pernah merasakan menjadi tuan rumah kongres. Tujuannya adalah agar Muhammadiyah semakin dikenal dan kian menyebar luas ke seluruh wilayah Hindia atau Indonesia.

Keberhasilan Persyarikatan Muhammadiyah di Makassar dapat dianggap memuaskan, sehingga organisasi ini mulai merambah dan

¹⁴ Suwarno, *Jurnal Akademika*, Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah, 1912- 1950, Vol. 21, No. 02, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2016), Hlm. 201.

membentuk kehadirannya di berbagai daerah Sulawesi Selatan. Kemajuannya terjadi dengan cepat, terutama dalam pembentukan Persyarikatan Muhammadiyah di Selayar sebagai sebuah kelompok baru pada tahun 1928, yang resmi diakui pada tahun 1932 dengan A.G.H Hayyung sebagai tokoh utama yang memimpin inisiatif ini. Persyarikatan Muhammadiyah di Selayar kemudian mengalami perkembangan seiring dengan perjuangan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di daerah-daerah lainnya, di mana pada saat itu, Muhammadiyah dipimpin oleh KH.Ibrahim.¹⁵

Didirikannya Muhammadiyah pada zamannya terkait erat dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Pada masa itu, umat Islam tengah menghadapi tantangan sinkretisme, di mana praktik-praktik keagamaan bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan lain. Keimanan masyarakat juga tercemar oleh perbuatan syirik. Oleh karena itu, Muhammadiyah hadir sebagai upaya untuk mengembangkan pemikiran baru dalam praktek kehidupan beragama, serta untuk menegaskan koreksi terhadap pola pikir yang keliru dalam tradisi keagamaan yang berlangsung pada tahun 1990-an.¹⁶

Pada tanggal 15 Juli 1923, Hoodfbestuur Muhammadiyah menetapkan berdirinya Department van Onderwijs Moehammadijah, unit khusus Bagian Sekolah yang sebelumnya dipimpin oleh H. Hisyam. Departemen dengan dipimpin oleh Mas Ngabehii (M.Ng.)¹⁷ Djojosoegitodengan tugas mengurus permasalahan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama terkait dengan standarisasi materi, metode dan kurikulum yang digunakan di

¹⁵ Misbahuddin, S.Pd.I., M.Hum, Sang Surya Bersinar Di Tanadoang: Gerakan Persyarikatan Muahmmadiyah Selayar (1928-1950), (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022), Hlm. 3

¹⁶ Muhammad Arwani Rofi'i, Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadist, *Jurnal Al-Ijaz*, Vol. 01, No.01 (Juni 2019), Hlm.42

¹⁷ Ngabehii (M.Ng) adalah gelar bangsawan Jawa dengan tingkat paling bawah atau keturunan Raja, Bupati, Wali di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur yang menjabat pada suatu jabatan dalam pemerintahan pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, dikutip dari website <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/ngabehi>, pada tanggal 05 maret 2024, pukul 08.20

setiap jenjang sekolah Muhammadiyah. Sekitar 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 September 1923, Hoodfbestuur Muhammadiyah secara mengejutkan menetapkan pendirian Madjelis Pimpinan Pengadjaran Moehammadijah, dengan pimpinan 3 orang, yaitu M.Ng. Djoejosoegito, R. Sosrosoegondo dan H. Hisyam. Penunjukan 3 orang ini semakin memantapkan sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah modern.

Pada tanggal 12 Maret 1924, K.H. Ibrahim, ketua Hoodfbestuur Muhammadiyah saat itu, sudah mengeluarkan ketentuan pendirian sekolah, sistem belajar, hari libur, kualifikasi guru dan murid, sanksi terhadap pelanggaran disiplin, biaya sekolah, kepala sekolah, dan administrasi sekolah.¹⁸ Kepemimpinan KH.Ibrahim yang menjadi PP Muhammdiaayah, menandai pergeseran kepemimpinan yang sangat signifikan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah sudah dipimpin oleh tokoh ulama mulai dari KH.Ahmad Dahlan sampai tokoh K.H.A.R Fachrudin.¹⁹ Hubungan antara Hoodfbestuur Muhammadiyah dan pemerintahan kolonial Belanda terlihat melalui keterlibatan mereka dalam operasional Klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah.

Dalam konteks layanan operasional, terlihat bahwa *Hoodfbestuur Muhammadiyah* menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial dengan mempekerjakan seorang dokter pemerintah dan menerima subsidi untuk operasional pelayanan PKO. Ini menunjukkan bahwa Hoodfbestuur Muhammadiyah memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial Belanda dalam aspek pelayanan kesehatan. Di bidang pendidikan, pada Kongres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, laporan mencatat bahwa Muhammadiyah telah berhasil mendirikan 16 HIS, 1 schakelschool, 40 dessoeschool, 15 jatimschoolen, dan 2 kweekschoolen. Ini menandakan komitmen Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dengan menyediakan berbagai jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal

¹⁸ Ibid, Hlm. 111

¹⁹ Abd. Rohim Ghazali, & Dkk, *M.Amien Rais Dalam Sorotan Generasi Muhammadiyah*, Cet I (Bandung: Mizan, 1998). Hlm.130

pelayanan perpustakaan, Muhammadiyah dapat diketahui memiliki empat perpustakaan di Yogyakarta, Batavia, Surabaya, dan Pekalongan. Perpustakaan-perpustakaan tersebut memiliki koleksi lebih dari 10.000 buku berbahasa Melayu, menunjukkan upaya Muhammadiyah dalam menyediakan sumber pengetahuan dan literatur bagi masyarakat di berbagai lokasi.

Dengan menerapkan sistem kerja yang bersifat sosial dan praktik kedermawanan, Muhammadiyah diakui sebagai "Islam ortodoks." Pada tahun 1931, mereka melanjutkan upaya mereka dengan membangun rumah yatim. Pelayanan ini menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian memberikan dukungan subsidi kepada Muhammadiyah. Melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), Muhammadiyah berperan di luar struktur birokrasi pemerintahan kolonial pada saat itu, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kekuatan masyarakat sipil di Hindia Belanda, yang dibentuk pada tahun 1912.²⁰

B. Arah Muhammadiyah Dibawah Kepemimpinan KH. Ibrahim

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam berdasar pada Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah didirikan oleh KH. A. Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau tanggal 18 November 1912 Masehi di Kota Yogyakarta. Muhammadiyah, demikian gerakan ini diberi nama oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul (bepengharapan baik), dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang semata-mata demi terwujudnya 'Ihzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.

Sebagai pendukung demokrasi dalam mengelola Muhammadiyah, Ahmad Dahlan turut memudahkan anggota Muhammadiyah dalam melakukan

²⁰ Hlm.206

evaluasi kinerja dan pemilihan pemimpin. Selama terlibat dalam gerakan dakwah Muhammadiyah, dilaksanakan dua belas kali pertemuan anggota setiap tahun, yang dikenal sebagai *Algemeene Vergadering* (persidangan umum). Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan, fokus pemahaman keagamaan tertuju pada tindakan nyata. Rangkuman ini dapat ditemukan dalam buku karya Abdul Munir Mulkhan, "Pesan-Pesan Dua Pemimpin Besar Umat Islam Indonesia Ahmad Dahlan Dan Hasyim Asyari".²¹

Pemikiran Muhammadiyah akan terkait secara logis dengan kondisi objektif kehidupan sosial saat pemikiran tersebut dirumuskan. Selain itu, seluruh konsep Muhammadiyah dapat dianggap sebagai upaya yang rasional untuk memahami ajaran Islam dan mewujudkannya dalam kehidupan sosial. Abdurrahman Wahid (1999:18) membagi pemimpin Islam di Indonesia menjadi dua kategori. Pertama, ada model yang menekankan kepemimpinan umat Islam dan memberikan prioritas pada kemampuan organisasional. Dengan menganalisis kutipan di atas, penulis memiliki ide untuk menguraikan arah Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim menjadi tiga bagian:

1. Kepemimpinan Muhammadiyah sebelum KH.Ibrahim

Muhammadiyah dibawah kepemimpinan KH.Ahmad Dahlan (1912-1923), pembaharuan keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan bahkan meninggalkan pesan monumentalnya bahwa islam adalah agama amal. Dalam bidang Ubudiyah KH.Ahmad Dahlan memulai dengan mengarahkan orang-orang sholat ke Ka'bah dan bukan lurus ke Barat. Adapun bentuk-bentuk amal nyata yang dilakukan adalah membantu anak yatim dan fakir miskin. KH.Ahmad Dahlan memiliki landasan amaliah yang monumental, dalam hal ini yakni teologi al-ma'un. Dapat dikatakan mencoba untuk merealisasikan dari apa yang terkandung dari isi surat al-ma'un.

Muhammadiyah baru memulai bergeser pada persoalan takhrij al-hadist dan persoalan-persoalan ubudiyah pada tahun 1927 pada masa

²¹ Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum, Dkk, Muhammadiyah Dalam Perspekti Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai. (Yogyakarta: Cv Orbitrust Corp, 2010), Hlm.10

kepemimpinan KH.Ibrahim. ketika seorang tamu dari india memprotes ubudiyah Muhammadiyah yang melaksanakan Shalat Idul Fitri didalam mesjid keraton yogyakarta, yang seharusnya muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan *tajdid* yang melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. sehingga mulai saat itulah Muhammadiyah menghimpun para ulama Muhammadiyah tentang persoalan Ubudiyah yang kemudian diberi nama Majelis Tarjih.²²

Pada masa KH. Hisyam 1935-1936 dibentuklah konsul-konsul pimpinan pusat di berbagai daerah. Kemudian badan-badan lainnya juga dibentuk sebagai tindak lanjut periode sebelumnya. Badan yang khusus menangani pers dan juga dibentuk pada tahun 1932 dengan tujuan untuk jangka pendek. Selanjutnya secara serentak juga dilakukan indonesiasi dalam istilah nama-nama asing. Pemikiran Muhammadiyah tentang konsep pencerahan sepenuhnya bertumpu pada nilai ajaran islam sebagai pencerahan islami sebagai misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang mengeluarkan manusia dari segala benak kegelapan menuju pada kehidupan yang cerah dalam hidayah Allah SWT.²³

Masa K.H Mas Mansyur (1937-1942). Tahun 1937 Muhammadiyah menetapkan pembentukan program Bank Muhammadiyah. Tahun 1938 mengubah kata Hindia Belanda dengan kata Indonesia. Sidang Tanwir yang sekarang merupakan lembaga tertinggi setelah Mukhtar dibentuk pada tahun 1939 dengan nama Majelis Tanwir. Tahun 1941, sebagai tindak-lanjut penataan kehidupan anggota ummat dan masyarakat, majlis ekonomi ditugaskan menyusun konsep peningkatan kehidupan ekonomi anggota. Pada masa K.H Mas Mansyur telah dapat disusun teori perjuangan

²² M. Djindar Tamimi, “ *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*”, Dalam Berita Resmi Muhammadiyah, No 06/1995 2000, Muharram 1417/ Mei 1996.

²³ Dr. Duriani ,M, Pd, I, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pencerah”, (Bandung: Indonesia Emas Group, 2022), Hlm.23

Muhammadiyah dalam 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah. Di samping itu juga disusun konsep tentang dunia qiyas, agama, sabilillah dan ibadah.

Majelis Tarjih menampakkkan eksistensinya pada masa ini juga, walaupun sudah ada pada masa sebelumnya.²⁴ Pada masa kepemimpinan Ki Bagoes Hadikoesoemo, pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih menonjol pada persoalan Aqidah dan Akhlak ijtimia 'iyah. Pada saat itu dirumuskannya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam rumusan tersebut dirumuskan secara singkat dan pokok pokok pikiran Ahmad Dahlan yang melahirkan Muhammadiyah. Arah pemikiran pada masa ini juga lebih banyak mengarah pada persoalan pilitis.²⁵

Masa Buya A.R Sutan Mansyur (1937-1942) Pada masa ini disusun strategi yang disebut dengan Tajdid Ideologi. Pada masa ini pula keanggotaan istimewa Muhammadiyah terhadap Masyumi atas kesepakatan bersama ditanggalkan. Masa K.H M. Yunus Anis (1953- 1959). Telah disusun rumusan operasional strategi perjuangan Muhammadiyah dan konsep Kepribadian Muhammadiyah. Masa K.H Ahmad Badawi (1962-1968). Penetapan Kepribadian Muhammadiyah, konsep awal Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Kemudian penyusunan konsep Pembangunan Masyarakat Pedesaan melalui gerakan dakwah.

Masa K.H Faqih Usman (1968-1968) Pada masa kepemimpinannya tidak banyak yang bisa dilakukan terjadi dikarenakan wafat. Kemudian digantikan oleh K.H A.R Fachruddin (1968-1990), Pada masa ini Muhammadiyah dapat dikatakan mengalami berbagai hal perubahan sosial, politik, ekonomi yang cukup rumit. Oleh karena itu masa ini Muhammadiyah berusaha menyusun kembali perjuangannya Lahirlah kembali Khittah Ponorogo, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM), Gerakan Jaun'alt, dan Dakwah Jama'ah,

²⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Op.Cit*, Hlm.73

²⁵ Kasman Singoedimejo, "Peranan Umat Islam Sekitar 17 Agustus 19433", Dalam Mimbar Ulum, September 1979, No 26, (Surabaya: Ipam, 2005), Hlm.43

landasan Program, perubahan asas dan tujuan berdasarkan UU No.8/1985, perumusan pola kebijakan dakwah.²⁶

2. Pergeseran Kepemimpinan Muhammadiyah

Header Nathsir menemukan data yang penting tentang para elit Muhammadiyah dilihat dari segi keseharian mereka. Bahwa Muhammadiyah sejak kelahirannya tahun 1912 sampai sekitar tahun 1960-an banyak dipimpin dan digerakkan oleh elit ulama yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pasantren dengan pekerjaan sebagai pedagang (wiraswasta) atau swasta. Ketua-ketua pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan (pendiri dan ketua pertama dari tahun 1912-1923) KH.Ibrahim (tahun 1923-1934), Hisyam (tahun 1934-1937), Mas Mansyur (tahun 1937-1942), Ki Bagoes Hadikoesumo (tahun 1942-1953), AR Sutan Mansyur (1953 sampai 1959), dan H.M Yunus Anis (tahun 1959 sampai 1962), adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tamatan pendidikan pasantren yang juga sebagai pedagang, guru (dosen) dan swasta.²⁷

Dari lima orang generasi kepemimpinan Muhammadiyah, ada tiga orang yang belajar ke Timur Tengah, yaitu KH Ahmad Dahlan, KH.Ibrahim, dan KH Mas Mansur. Sehingga disamping mereka belajar di pesantren tradisional yang tersebar di Jawa, mereka membuka cakrawala baru pendidikan yang bersifat internasional, yaitu Timur Tengah. Kombinasi pendidikan tradisional di beberapa pesantren Jawa dengan wawasan keilmuan yang lebih luas di timur tengah, memperkuat wawasan dan ketrampilan keagamaan bagi yang bersangkutan dalam mengkomandani organisasi Muhammadiyah.²⁸

Pada era kepemimpinan Ahmad Badawi (tahun 1962 sampai 1968), Faqih Usman (tahun 1968), dan A.R Fachruddin (tahun 1968 sampai 1990, dalam beberapa periode), Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh yang

²⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Op.Cit*, Hlm.75-76

²⁷ Header Natshir, "Prilaku Politik Elit Muhammadiyah", (Yogyakarta:Tarawang, 2010), Hlm.7

²⁸ Agus Miswanto, Peran Pesantren Dalam Melahirkan Kepemimpinan Muhammadiyah: Analisis Historis Terhadap Profil Ketua Umum Pimpinan Pusat Tahun 1912-2020, *Jurnal Tarbiyatun*, Vol.11 No. 1 (2020).Hlm.35

berlatar belakang sebagai pegawai negeri (Departemen Agama) kendati ketiganya di kenal sebagai Kyai tamalan pondok pasantren. Faqih Utsman bahkan pernah menjadi Mentri Agama selama dua kali, yaitu pada zaman kabinet Halim (1949) dan pada zaman kabinet Kabinet Wilopo-Prawiro (1952-1953).

Kehadiran elit ulama yang juga pegawai negeri dalam tubuh Muhammadiyah tersebut tampak lebih menonjol sejak masa kepemimpinan A.R Fachruddin (1968-1990), kepemimpinan yang tergolong cukup lama (22 tahun) yang diikuti oleh kecenderungan serupa di ajaran kepemimpinan lainnya baik di tingkat pusat maupun wilayah dan daerah. Gejala ini dikenal dengan kehadiran elit birokrat di Muhammadiyah.

Masa kepemimpinan A.R Sutan Mansur (1953-1959), periode H.M Yunus Anis (1959-1962), periode Ahmad Badawi (1962-1968), seterusnya sampai pada masa Azhar Bashir (1990-1995), pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah bisa disebut fikih-sentris atau juga ada yang menyebut sebagai shari'ah sentris meskipun juga tidak menegaskan adanya perkembangan lain dalam masalah-masalah Aqidah dan Akhlaq ijtimaiyah yang cukup signifikan. Dalam bahasa penulis dapat dikatakan walaupun pengembangan struktur organisasi mengalami kemajuan namun berbanding terbalik dengan syariat dan tujuan awal adanya Muhammadiyah.

Kepemimpinan dalam tubuh Muhammadiyah jika dipernodekan ada beberapa bentuk: pertama, tahun 1912-1923. Periode ini merupakan peletakan dasar gerakan. Dalam periode tersebut, kepemimpinan Muhammadiyah secara langsung berada pada K.H Ahmad Dahlan Kedua, tahun 1923-1942. Tahun ini merupakan periode pengembangan dan pementapan Muhammadiyah (konsolidasi). Ketiga, tahun 1942-1968. Pada tahun ini merupakan pementapan (konsolidasi) ideologi dan strategi perjuangan Muhammadiyah.²⁹ Maka pada periode selanjutnya penulis

²⁹ Djanawi Hadikusumo, "Matahari-Matahari Muhammadiyah", (Yogyakarta: Pt Persatuan, 2000), Hlm.60

memberi nama Reformasi intelektual Muhammadiyah diawali dengan munculnya Amien Rais yang kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan selanjutnya.

Dalam kajian sosiologis kerap membedakan dua kategori golongan elit pemimpin, yakni pertama, para tokoh yang termasuk "kelas yang berkuasa" (the ruling class), dan kedua, para tokoh yang tergolong "para elit strategis" (the strategic elite). Golongan pertama adalah para tokoh politik yang memegang jabatan-jabatan penting dari pemerintahan yang tengah berkuasa. Sementara yang kedua, merupakan tokoh atau pemimpin non pemerintah yang berpengaruh, baik di bidang ekonomi (penguasa), politik (pemimpin partai politik), agama (pemimpin organisasi keagamaan formal atau informal), sosial (pemimpin organisasi sosial), maupun tokoh informal lainnya.

Secara garis besar perkembangan Muhammadiyah menjelang usia satu abad bisa dibagi kedalam empat fase. Fase pertama ialah fase kreatif-inklusif yang ditandai dengan kelahiran berbagai amal usaha yang dipelopori oleh KH.Ahmad Dahlan sendiri. Disini Muhammadiyah lebih tepat disebut dengan gerakan penyadaran sosila dan budaya, yang ,menggerakkan masyarakat publik untuk memecahkan persoalan kehidupan sendiri, sesuai dengan kemampuan yang ada dan sumber yang tersedia. Sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan ijtihad (pemikiran) dan Tajdid (pembaharuan).

Fase kedua adalah fase ideologis, dibawah kepemimpinan KH.Ibrahim yang ditandai dengan kelahiran lembaga fatwa syariah dengan dibentuknya Majelis Tarjih. Muhammadiyah selama fase kedua ini mengalami ideologisasi yang bersamaan dengan meluasnya gerakan kemerdekaan Indonesia. Hasil fatwa Tarjih inilah yang kemudian dijadikan referensi prilaku dan hubungan sosial para aktivis gerakan ini. Kritik keras terhadap tradisi lokal mulai gencar dilakukan dilakukan pada fase yang dikenal dengan pemberantsan TBC (Takhayul, Bidah dan Chufarat). Disinilah

sebutan Puritanisme mulai diberikan orang pada Muhammadiyah yakni banyak berkaitan dengan Wahabisme di Saudi Arabia.³⁰

Sedangkan selama dekade terakhir fase ketiga sebagai revitalisasi etos pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan. Yang mana juga disebut sebagai spritualisasi atau sufistikasi syariah yang muncul sejak awal 1990-an bersamaan dengan masuknya aktivis berpendidikan tinggi modern sekuler dari berbagai disiplin ilmu. Lembaga Tarjih ini di ubah menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam dengan menempatkan fatwa syariah sebagai bagian kecil didalamnya. Bersamaan dengan dakwah kultural dan penempatan perempuan pada posisi kepemimpinan garakan sebagai kelanjutan kritik doktrin.

Disaat yang sama Muhammadiyah membuka diri dengan dunia luar. Tahun 1920 Muhammadiyah mulai menjalin hubungan dengan gerakan islam diluar negeri. Zaman keterbukaan dan inovasi kreatif itu terus berlangsung meskipun gerakan ini mulai mengalami masa-masa ortodoksi dengan dibentuknya lembaga Fatwa Syariah yang kemudian yang dikeal dengan Majelis Tarjih tahun 1927. Periode ortodoksi ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an.³¹

Menurut Max Weber, kepemimpinan secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian: *pertama*, kepemimpinan tradisonal yang mendasarkan pada faktor warisan secara turun-temurun. *Kedua*, kepemimpinan yang kharismatik yang mengandalkan aspek kewibawaan personal dari kepribadian seorang tokoh atau pemimpin. *Ketiga*, kepemimpinan legal-rasional yang berlandaskan kepada faktor keahlian atau skill. Setiap masing-masing tokoh memiliki keahlian atau pola kepemimpinan dibidangnya. Berdasarkan teori kepemimpinan Max Weber, pola kepemimpinan Muhammadiyah dibedakan sebagai berikut, sedangkan menurut Asep Duad Kosasih dalam jurnal “Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah”:

³⁰ Abdul Munir Mulkhan, “Kiai Ahmad Dahlan-Jejak Pembaharuan Sosial Darn Kemanusiaan”, (Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara, 2010), Hlm.26

³¹ *Ibid*, Hlm 29-30

Tabel.1 Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah

No.	Masa Kepemimpinan	Pola Kepemimpinan
1.	K.H. Ahmad Dahlan	Kharismatik
2.	K.H Ibrahim	Kharismatik
3.	K.H. Hasyim	Kharismatik
4.	K.H Mas Mansyur	Kharismatik
5.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Kharismatik
6.	Buya A.R Sutan Mansur	Kharismatik
7.	K.H.M Yunus Anis	Kharismatik
8.	K.H Ahmad Badawi	Kharismatik
9.	K.H Haqih Ustman	Kharismatik
10.	K.H.A.R Fachrudin	Kharismatik
11.	K.H Ahmad Azhar Basyir M.A	Legal-rasional
12.	Prof. Dr. H. M. Amien Rais	Legal-rasional

mereka akademisi yang memiliki wawasan keagamaan yang mumpuni dan menjadi dosen di perguruan tinggi Indonesia.³² Pemuda dalam struktur organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mengumpulkan para pemuda.

Penempatan bagian tersebut, sesuai dengan keputusan kongres Makassar, digabungkan dengan Hizbul Wathan. Oleh karena itu, Hizbul Wathan hanya memiliki makna panduan, dan gerakan baru ini diberi nama Muhammadiyah Bagian Pemuda. Dalam kongres-kongres berikutnya, peraturan yang berkaitan dengan gerakan Muhammadiyah Bagian Pemuda semakin diperbaiki, sehingga secara bertahap Pemuda Muhammadiyah dapat berdiri sendiri sebagai suatu gerakan pemuda dalam organisasi Muhammadiyah. Hal ini memberikan banyak makna pada perjuangan Muhammadiyah, terutama dalam konteks nasional Indonesia. Terdapat empat tujuan yang ingin dicapai, yakni mempersatukan anak-anak dan

³² Asep Daud Kosasih Dan Suwarno, Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah, *Jurnal Islamadina*, Vol. IX, No. 01, (Januari 2010), Hlm. 41

pemuda-pemuda di dalam mengajarkan perintah-perintah Allah swt. (agama islam). Memajukan kerukunan, persaudaraan dan memperbaiki pergaulan. Mempelajari dan mengamalkan segala pendidikan dan pelajaran agama islam sehingga timbulnya semangat dan tenaga islam dapat bertambah kekal. Mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak dapat menjadi “orang Islam”.³³

Dari model pergerakan dakwah keagamaan Muhammadiyah terletak pada Majelis Tarjih yang sekarang dikenal sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid, yang diinisiasi pada muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang. Majelis ini diresmikan setelah kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Majelis Tarjih merupakan lembaga dalam Muhammadiyah yang terdiri dari ulama-ulama dan memiliki peran krusial dalam memberikan arahan serta pedoman bagi praktik keagamaan anggota Muhammadiyah secara umum. Pembentukan Majelis Tarjih ini menjadi keputusan resmi yang diambil pada kongres tersebut, sebagai langkah strategis dalam menghadirkan Majelis Tarjih sebagai panduan bagi kehidupan keagamaan anggota Muhammadiyah, yang pada masa KH. Ahmad Dahlan belum memiliki struktur yang serupa.

Majelis ini beroperasi di bawah kepemimpinan yang besar dan muncul berdasarkan gagasan dari KH. Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah Surabaya. Pembentukan majelis ini bertujuan untuk mencegah perpecahan di dalam Muhammadiyah terkait isu-isu agama atau pelanggaran anggota Muhammadiyah terhadap norma-norma agama. Ini dilakukan untuk mengatasi orientasi duniawi yang dapat mengaburkan tujuan utama dakwah Muhammadiyah. Majelis ini juga bertujuan untuk menyatukan pendekatan hukum Islam di kalangan Muhammadiyah, serta memantau implementasi syariat Muhammadiyah yang terkait dengan hukum Islam.

Banyak keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih, baik dalam bentuk petunjuk terkait pelaksanaan ibadah maupun penanganan masalah

³³Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan Dan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Maarif, “1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan”, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), Hlm.79

dalam masyarakat. Selama kepemimpinan KH. Ibrahim, terjadi berbagai perubahan yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi agar lebih efisien. Tujuan dari perubahan tersebut adalah agar langkah-langkah organisasi menjadi lebih optimal di masa depan, dengan fokus pada perluasan cakupan program dan pengembangan dalam bidang pelayanan masyarakat. Transformasi ini mengubah Muhammadiyah dari organisasi lokal yang beroperasi terutama di Residensi Yogyakarta menjadi entitas nasional yang mencakup seluruh wilayah Hindia-Belanda, tidak hanya di Pulau Jawa.³⁴

Sebagai gerakan yang mempromosikan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga memberikan kontribusi besar dalam sektor kemasyarakatan dan pendidikan. Adanya klinik-klinik kesehatan, panti asuhan, dan rumah-rumah piatu, bersama dengan ribuan sekolah, menjadikan Muhammadiyah sebagai entitas non-Kristen yang signifikan dalam domain kemasyarakatan, pendidikan, dan agama swasta di Indonesia. Organisasi wanita mereka, 'Aisyiah', dapat dikatakan sebagai gerakan wanita Islam terbesar di dunia. Secara singkat, Muhammadiyah dapat dianggap sebagai organisasi yang dominan dan kuat di negara terbesar kelima di dunia.³⁵

Pada tanggal 15 September 1923, K.H. Ibrahim, sebagai ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah, mengumumkan sebuah pernyataan yang menggambarkan pembentukan Madjelis Pimpinan dan Pengajaran Moehammadijah atau MPM. Fungsi utama MPM adalah mengawasi, mengelola, dan memperbaiki proses pengajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kepemimpinan MPM pada saat itu diberikan kepada tiga individu, yakni M.Ng. Djojosoegito, R.Sosrosoegondo, dan K.H. Hisyam. Pada tahun 1923, Muhammadiyah mulai menggunakan bahasa Indonesia untuk menyebutnya sebagai "perkumpulan tahunan," karena pada periode tersebut, musyawarah tertinggi diadakan setiap tahun.

³⁴ Ibid, Hlm.80

³⁵ Suriadi Rahmat Dan Romelah, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Yang Berkarakter Dakwah Dan Tajdid, *Jurnal El-Ta'dib*, Vol.02 No.02 (Oktober 2022) Hlm.315-317

Pada tahun 1924 Muhammadiyah mulai memakai kongres" istilah "congres" hingga tahun 1941 yang juga diadakan sekali dalam setiap tahunnya. Pada tahun 1936, Muhammadiyah menyelenggarakan "Congres Seperempa Abad".³⁶ Pada tahun 1924, MPM menerapkan kebijakan terkait pendidikan yang dikenal sebagai "Ketentuan untuk Muhammadiyah Bagian Sekolahan mengenai Sekolah-sekolah Muhammadiyah". Selain itu, pada periode yang sama, MPM juga merancang Rancangan Pengajaran (Leerplan) atau kurikulum untuk sekolah Kelas II Muhammadiyah. Tindakan ini mendapatkan persetujuan dari Hoofdbestuur Muhammadiyah. Secara bertahap, Muhammadiyah yang telah memenuhi syarat berhasil menerima bantuan meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bantuan yang diterima oleh pihak Katolik atau Kristen yang diberikan setiap tahun.³⁷

Menurut A. Jainuri dan M. Yusron Asrofie, pada tahun 1922, cabang-cabang Muhammadiyah diluar Yogyakarta telah didirikan di beberapa kota seperti Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan, dan Pekajangan. Di bawah kepemimpinan KH.Ibrahim yang menggantikan KH.Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mulai mengalami perkembangan di Pulau Jawa, khususnya di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah (1998-2005), menyatakan bahwa peran penting Minangkabau dalam pertumbuhan awal Muhammadiyah memungkinkan organisasi ini mencapai seluruh Indonesia. Meskipun Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, perkembangannya di Minangkabau mengubah sifatnya menjadi gerakan nasional dengan ciri khas etnis Minangkabau.³⁸

Muktamar di Makassar sukses dilaksanakan dan dianggap sebagai contoh yang harus dijadikan momentum untuk mengembangkan semangat,

³⁶Ridho Al-Hamdi, *115 Tahun Kepemimpinan Muhammadiyah Mengenal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Beserta Majelis Lembaga Biro 1912-2027*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2023), Hlm.02

³⁷Faisal Anas, Peran Kh.Hisyam Dalam Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah Ahun 1920-1937, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, (2019),Hlm. 9

³⁸Suwarno, Dari Yogyakarta Merajut Indonesia : Perkembangan Muhammadiyah, 1912-1950, *Jurnal Akademika* , Vol.21, No.02 (Juli-Desember 2016), Hlm. 202

pemikiran, dan atmosfer kemajuan dalam Islam. Pemikiran program, termasuk dakwah komunitas, pendekatan negara Pancasila sebagai "dar al-ahdi wa syahadah," dan isu-isu strategis yang diambil keputusannya dalam muktamar mencerminkan pandangan Islam yang progresif. Ini juga mencerminkan semangat orang-orang Muhammadiyah untuk memajukan gerakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peran mereka dalam kebangsaan. Muhammadiyah dituntut untuk membuktikan bukan hanya melalui retorika yang berlebihan, tetapi melalui tindakan konkret sebagai model pergerakan Islam dalam kehidupan umat, bangsa, dan manusia secara universal.³⁹

Pada perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah di luar Jawa pada kurun waktu yang fenomenal adalah Sumatera Barat. Muhammadiyah memasuki Sumatera Barat pada tahun 1925 di Minangkabau, melalui Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal pula dengan sebutan Haji Rasul. Mengenai riwayat perkembangan awal gerakan Muhammadiyah di Minangkabau ini antara lain dikemukakan sebagai berikut:

"Pada bulan Maret dan April 1925, Haji Rasul pergi ke pulau Jawa, antara lain dengan tujuan menjenguk saudaranya, Fatimah dan suaminya. A.R. Sutan Mansur saat itu di Pekalongan. Pada waktu itu A.R. Sutan Mansur sudah menjadi tokoh penting Muhammadiyah Pekalongan, di samping itu pekerjaan beliau sebagai seorang pedagang batik. Agaknya A.R. Sutan Mansur mendesak Haji Rasul untuk mengembangkan dan mengubah Sandi Aman, sebuah organisasi keagamaan yang terdapat di Sungai Btang, Maninjau, menjadi Muhammadiyah. Selama di Muhammadiyah. Selama berada di Jawa, Haji Rasul juga menyempatkan diri bertemu dengan pengurus besar, khususnya ketuanya, K.H. Ibrahim, yang juga teman bersama-sama melakukan ibadah haji. Segera sesudah Haji Rasul pulang ke Maninjau, Sandi Aman diubah menjadi suatu cabang Muhammadiyah,

³⁹ Hlm.8

dengan nama sekolah keagamaan, Madrasah Ibtidaiyah. Pada 20 Juni 1925, di Padang Panjang dibentuk sebuah organisasi yang disebut Tabligh Muhammadiyah dengan Djamaan Sidi Sutan dan Makmur Salin sebagai ketua dan sekretarisnya. Setahun kemudian, Juli 1926, organisasi Tabligh Muhammadiyah diubah menjadi cabang Muhammadiyah Minangkabau menyusul cabang Maninjau yang secara resmi didirikan pada Januari 1926. Pada tahun yang sama, kedua cabang awal di Pulau Sumatera itu menyatakan memiliki 3.644 anggota, 1.400 untuk cabang Maninjau dan 2.244 untuk Padang Panjang, Minangkabau. Dua tahun setelah Muhammadiyah masuk pertama kali ke Minangkabau pada tahun 1925, jumlah cabang dan rantingnya di sana sudah mencapai 11 buah. Pada tahun 1932 jumlah tersebut meningkat menjadi 57 buah yang menunjukkan tingkat kecepatan berkembang yang cukup tinggi.”⁴⁰

Bagi Muhammadiyah di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, dapat diibaratkan sebagai peran Yogyakarta bagi Jawa. Di Minangkabau, ada tiga faktor yang mendukung percepatan perkembangan Muhammadiyah di sana. Pertama, sejak awal tahun 1920-an, telah muncul gerakan kaum moderat Islam yang dipimpin oleh kalangan muda, memudahkan penerimaan ide Muhammadiyah. Kedua, para pemimpin Muhammadiyah di Minangkabau merupakan ulama asli dari daerah tersebut dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Dan ketiga, pemimpin-pemimpin tersebut umumnya memiliki hubungan kekeluargaan, baik melalui keterkaitan regional maupun ikatan perkawinan.

Dalam konteks ini, daerah Minangkabau menonjolkan sejumlah tokoh mubaligh dan mubalighah terkemuka yang tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Di Bengkulu, perkembangan Muhammadiyah cukup signifikan terutama karena hubungan

⁴⁰ Hasanadi, Seno (2015): *Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925-2010*.

dagang yang erat dengan Minangkabau. Oleh karena itu, pada tahap awal, pengaruh Muhammadiyah banyak dipegang oleh para pedagang yang berasal dari Minangkabau. Di samping itu, peran penting juga dimainkan oleh para guru agama dan pedagang asli Minangkabau dalam penyebaran Muhammadiyah ke wilayah Palembang dan Lampung.

Sementara itu, perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan terjadi melalui keluarga Haji Djapri yang tinggal di Teluk Betung. Dalam perkembangan lebih lanjut, Muhammadiyah di daerah ini mendapatkan bimbingan langsung dari pengurus besar dengan mengirimkan mubaligh dan mubalighah ke sana. Sebelum diselenggarakannya Kongres di Kalimantan Selatan sebagai tanda bahwa Muhammadiyah telah berkembang di luar Jawa pada tahun 1932, yang diadakan dalam Kongres ke-21 di Makassar. Proses ini tidak terlepas dari berbagai rintangan yang dihadapi seiring berjalannya waktu, dan masa kepemimpinan KH. Ibrahim berakhir dengan meninggalnya beliau pada awal tahun 1934, setelah memimpin Muhammadiyah selama sekitar sepuluh tahun dan menabur benih kebaikan yang tak terhitung.⁴¹

C. Pandangan Sesama Tokoh Muhammadiyah Tentang Pemikiran KH. Ibrahim

Dengan memerhatikan transformasi yang terjadi di Muhammadiyah di bawah arahan KH. Ibrahim, baik dalam struktur kepengurusan maupun dalam paradigma pemikirannya, pasti terdapat beragam sudut pandang di kalangan anggota Muhammadiyah terkait kepemimpinan KH. Ibrahim tersebut, baik yang bersifat mendukung maupun menentang. Fenomena perbedaan pandangan ini adalah hal yang wajar dalam suatu periode kepemimpinan, karena tidak realistis mengharapkan bahwa semua individu memiliki perspektif yang seragam. Menurut penulis, pendekatan terbaik untuk menilai kepemimpinan

⁴¹ Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan Dan Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Maarif, *Op.Cit*, Hlm. 87-88

seseorang adalah melalui saling pengertian, meskipun hal ini tidak berarti harus sepakat pada setiap aspek.

Jika diperinci lebih lanjut, banyak figur publik yang mengambil sikap terkait kepemimpinan KH. Ibrahim. Namun, dalam konteks ini, penulis memfokuskan pandangan pada beberapa tokoh dari Muhammadiyah untuk menjadikan tulisan lebih spesifik. Pendekatan ini diambil agar arah yang dibahas dalam tulisan ini lebih terfokus. Penulis dengan tegas menyampaikan bahwa meskipun tidak semua pandangan yang disajikan mendukung sepenuhnya kepemimpinan KH. Ibrahim, ada juga yang bersifat kritis. Analisis ini dilakukan dengan melihat realitas yang terjadi di Muhammadiyah, dan penulis merangkum beberapa pandangan dari tokoh Muhammadiyah lain sebagai pelengkap, sehingga pembaca dapat memahami peran yang dimainkan oleh KH. Ibrahim di Muhammadiyah pada masa kepemimpinannya.

Menurut Kyai Dahlan, keterbelakangan yang dihadapi umat Islam sebenarnya disebabkan oleh kebodohan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah ini, menurut pandangannya, adalah melalui pendidikan. Dalam tulisannya ini, ia mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar pendidikan yang harus ditegakkan guna membangun sebuah bangsa. Pertama, Pendidikan Akhlak menjadi upaya untuk menanamkan karakter yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kedua, Pendidikan Individu dianggap sebagai langkah untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, keyakinan dan intelektualitas, perasaan dan akal, serta dunia dan akhirat. Sementara itu, ketiga, Pendidikan Sosial dianggap sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.⁴²

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, kebangkitan Muhammadiyah merupakan usaha untuk menyegarkan pemahaman umat Muslim tentang agama mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran umat Muslim dengan cara mengenalkan kembali ajaran Islam yang

⁴² Falahuddin, Gerakan Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Awal Abad Ke-20: Studi Kasus Muhammadiyah, *Jurnal*, Vol.06 No. 01 (Juni 2017), Hlm.103

sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muhammadiyah lahir dengan fokus keagamaan dan berperan sebagai gerakan puritan yang bertujuan menghapus beban-ban kultural Islam yang dipengaruhi oleh budaya agraris. Dari orientasi keagamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah berusaha melakukan perubahan kualitatif yang bersifat keagamaan. Dengan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, Muhammadiyah berusaha keras untuk menyucikan agama dan mengeliminasi pengaruh-pengaruh kultural serta simbol-simbol yang tidak relevan dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan agar Muhammadiyah dapat menjadi lebih dinamis dalam menghadapi suasana sosial dan kultural yang baru.

Sebagai seorang ulama yang lahir pada akhir abad ke-18 dan aktif selama awal abad ke-19, pengalaman hidupnya mencerminkan dinamika yang sangat luar biasa. Kelahirannya dalam lingkungan keluarga berilmu dan intelektual memberikan sudut pandang ilmiah yang tidak terpisahkan dari perkembangan dirinya menjadi ulama yang maju pada zamannya. Kyai Ibrahim mengalami perjuangan batin yang kuat, didukung oleh kebijaksanaan keilmuannya, dan sebagai seorang yang berilmu, ia berhasil meraih status ulama yang berkemajuan pada masa kolonial Belanda. Dalam perspektif sebagai intelektual pada era tersebut, Kyai Ibrahim mampu merumuskan beberapa agenda besar sebagai bagian dari gerakan moral yang menyatukan bangsa. Analisis Max Weber mengenai kaum intelektual menjelaskan bahwa mereka memiliki kekhasan dengan akses khusus terhadap pencapaian tertentu yang dianggap sebagai nilai budaya. Dengan demikian, Kyai Ibrahim dapat diartikan sebagai sosok yang mencerminkan "kepemimpinan" dalam komunitas budaya, karena mampu mengambil peran yang signifikan dalam mengarahkan perubahan moral dan persatuan bangsa pada masa kolonial Belanda.

Budaya yang dimaksud di sini mencerminkan representasi Muhammadiyah sebagai hasil dari interaksi antara komunitas terpelajar, terorganisir, dan modern pada awal abad ke-19 di kawasan Asia Tenggara. Melalui peran ganda Kyai Ibrahim, Muhammadiyah tidak hanya menolak

intervensi kolonial Belanda tetapi juga berhasil menyatukan diri sebagai organisasi yang eksis di tengah-tengah bangsa penjajah. Dengan berbagai inovasinya, Kyai Ibrahim berhasil merefleksikan pesan Kyai Ahmad Dahlan, "Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan Jangan Mencari Hidup di Muhammadiyah," dengan tulus untuk perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang memberikan pencerahan dan dampak yang lebih luas, menjadi tonggak kebangkitan kaum intelektual di Indonesia pada masa itu, di tengah dominasi kolonial Belanda.

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari fragmen perjalanan dakwah Kyai Ibrahim, seorang ulama dan ketua organisasi keagamaan Muhammadiyah. Perjalanannya yang melintasi zaman ditandai oleh kreativitas dan inovasi, dengan berbagai terobosan yang telah diukirnya sebelum kemerdekaan. Hal ini memiliki makna mendalam bagi kami, generasi muda Muhammadiyah, sebagai dorongan kuat untuk melihat lebih dalam dan mengapresiasi nilai keikhlasan dalam setiap perjuangan dakwah Muhammadiyah. Kyai Ibrahim berhasil menjadi sumber inspirasi dengan membuka pandangan yang tabu terhadap pola hubungan masyarakat feodal dan berbagai tipologi budaya. Ini membuka

peluang baru dalam berdakwah dan membangun komunikasi antar golongan. Kontribusinya menjadi landasan awal gerakan kebangkitan masyarakat Indonesia, dengan tujuan bersama untuk mewujudkan negara yang berdaulat dan merdeka dari penjajahan.

Kerja intelektual berasal dari ketertarikan religius, yang dapat ditemukan dalam pengalaman tertinggi atau setidaknya terkandung dalam pengalaman nyata saat ini. Karya intelektual cenderung menggunakan simbol-simbol keagamaan, tradisi penghormatan, dan perjuangan sungguh-sungguh untuk berhubungan dengan yang suci. Ini merupakan tradisi kaum intelektual yang paling awal, luas, dan penting".⁴³ Penulis setuju dengan pandangan tersebut,

⁴³ <http://www.fpptma.or.id/2020/09/ulama-dan-gerakan-kaum-intelektual.html#gsc.tab=0>

menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat kerja intelektual, tidak hanya cukup dengan pendidikan dan keterampilan peran semata, melainkan juga perlu adanya nilai religius yang kuat sebagai dasar dalam mengejar tekad dan usaha. Seperti yang ditunjukkan oleh Kyai Ibrahim pada awal abad ke-19, beliau adalah contoh nyata seorang intelektual Muslim yang lahir dengan tujuan untuk berbuat sesuatu demi keberlangsungan kehidupan yang lebih bermartabat melalui ilmu dan iman.

Selama abad ke-19, dunia Islam mengalami penindasan dan kejatuhan secara politik, ekonomi, dan kultural akibat kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Dampak buruk dari dominasi Barat sangat terasa, menyebabkan komunitas Muslim mengalami kemerosotan secara umum. Bangsa Barat melihat kaum Muslim sebagai warga kelas kedua yang kehilangan kehormatan mereka. Inilah yang mendorong munculnya organisasi Islam dan gerakan pembaharuan. Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, memegang peran penting sebagai mata rantai dalam gerakan pembaharuan Islam modern, mengikuti seruan Jamaluddin Al-afghani abduh. Gerakan tajdid yang diterapkan oleh Muhammadiyah memiliki dua makna sekaligus, yakni pemurnian ajaran agama Islam dan dinamisasi atau reformasi.⁴⁴

Dilihat dari fokus pergerakan Muhammadiyah, seperti yang tercantum dalam AD/ART pada masa awal, tampaknya sangat jelas bahwa kegiatan organisasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek agama Islam dan masyarakat. Dua konsep kunci ini secara konsisten menegaskan identitas Muhammadiyah sebagai suatu gerakan Islam yang selalu berupaya untuk memajukan masyarakat. Identitas atau ciri inilah yang dianggap penting untuk dipahami, pada awal berdirinya Muhammadiyah, terdapat dua arus besar gerakan yang mencuat dalam ruang publik. Kedua arus utama tersebut melibatkan orientasi politik dan orientasi sosial, yang meskipun sering kali saling beriringan secara harmonis, namun tidak jarang menimbulkan perbedaan pandangan dan prinsip perjuangan.

⁴⁴ Faisal Anas, *Op.Cit*, Hlm.5

Gerakan utama tersebut memiliki fokus yang berbeda, yakni orientasi politik dan sosial. Keduanya kadang-kadang bekerja sama secara harmonis, tetapi seringkali terdapat perbedaan pandangan dan prinsip perjuangan di antara keduanya. Pertama, terdapat gerakan politik yang memiliki tujuan untuk meraih kemerdekaan. Gerakan ini, yang diwakili oleh Syarekat Islam, menjadi dominan dalam ranah politik kebangsaan. Syarekat Islam, dengan basis massa yang besar dan kokoh, berupaya mempercepat perjuangan mencapai kemerdekaan RI melalui tindakan politik konkret. Kedua, ada gerakan sosial yang bertujuan untuk memajukan masyarakat. Gerakan ini, yang diwakili oleh Budi Utomo dan Muhammadiyah, mencerminkan semangat kaum idealis. Meskipun Budi Utomo pada akhirnya beralih menjadi gerakan politik praktis dan mengalami pembubaran pada puncak kejayaannya, Muhammadiyah tetap konsisten sebagai gerakan sosial keagamaan sejak awal berdiri hingga saat ini.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu tetap pada pendiriannya untuk tidak beralih menjadi suatu gerakan politik. Muhammadiyah terus menerus berkomitmen untuk memilih jalur kemajuan dan kegembiraan masyarakat. Kesetiaan Muhammadiyah terletak pada perjuangannya yang konsisten di bidang keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Komitmen ini diperkuat lagi dalam AD/ART saat ini, yang menegaskan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berfokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.⁴⁵ Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah tentu memiliki misi untuk menyampaikan perintah dan ajaran agama Islam guna mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka dakwah ini adalah melalui penyebaran ajaran agama.⁴⁶

Faktor utama untuk penyebaran Muhammadiyah adalah upaya tabligh dan dakwahnya yang langsung memengaruhi tindakan nyata di tengah-tengah

⁴⁵ Dr. Muchlas, M.T.,Dkk, "Dakwah Muhammadiyah Dalam Masyarakat Digital: Peluang Dan Tantangan, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), Hlm.14

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 49

masyarakat yang lebih luas. Karena itu, tidak mengherankan bahwa hal ini menimbulkan reaksi kuat dari pemerintah Hindia-Belanda pada saat itu.⁴⁷ Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, masalah akidah dianggap sebagai pokok dalam beragama dan dijelaskan secara sederhana dalam keputusan Majelis Tarjih. Persoalan akidah tersebut dibahas dalam kitab iman yang diformulasikan oleh peserta dan ulama Muhammadiyah. Kitab iman ini membahas 20 sifat yang tetap diyakini dan dijadikan sebagai keyakinan akidah dalam syariat oleh masyarakat umum.

Abdul Mu'ti menyatakan dengan tegas bahwa Muhammadiyah didasari oleh motivasi teologis, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mencapai tingkat keimanan dan ketaqwaan yang sempurna melalui pemahaman ilmu pengetahuan yang mendalam.⁴⁸ Realitas pribadi KH. Ibrahim, sebagai perintis dan penafsir gerakan, menunjukkan bahwa Muhammadiyah perlu menjauhi kecenderungan tradisional dan menghindari mencapai puncak yang stagnan. Diperlukan keberanian untuk secara kritis mengevaluasi semua upaya dalam amal-usaha, membebaskan diri dari rutinitas metodologis. Baik dari segi institusi maupun individu, Muhammadiyah dan KH. Ibrahim adalah perwakilan gerakan pembaharuan. Penting bagi keduanya untuk terus menghasilkan ide-ide yang brilian dan menyegarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, Muhammadiyah dan KH. Ibrahim harus terus mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* dan Majelis Tarjih, tidak boleh berhenti menyuarakan ide-ide inovatif guna memperbarui dan memajukan gerakan tersebut.⁴⁹

Dalam perspektif Muhammadiyah, konsep *tajdid* memiliki dua makna. Pertama, *tajdid* diartikan sebagai *tanzif* atau *tathir*, yang berarti pemurnian atau purifikasi. Ini mengacu pada usaha menjaga agar petunjuk agama Islam tetap

⁴⁷ *Op.cit*, hlm. 116

⁴⁸ ST Rajiah Rusydi, Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Dibidang Pendidikan Dan Tokoh), *Jurnal Tarwabi*, Vol. 01 No.02, Hlm.143

⁴⁹ Sihabudin, M.Ag, "Sifat 20 Menurut Al-Quran (Dalam Pandangan Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah)", (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (Kdt), 2023), Hlm. 7

terpelihara sesuai dengan aslinya. Kedua, tajdid diartikan sebagai tashlih atau tahdith, yaitu pengembangan, inovasi, atau pemodernan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks Muhammadiyah, isu tajdid terutama berkaitan dengan masalah teologi (aqidah), yang dapat diakses melalui pendekatan tanzhiif atau Tath-hiir. Muhammadiyah menekankan pemahaman aqidah yang disebut sebagai aqidah shahiihah, yang mengacu pada pandangan yang mengikuti tradisi salaf. Hal ini terlihat dalam komitmen Muhammadiyah terhadap aqidah, seperti yang terdokumentasikan dalam kitabul hipti (kitab himpunan putusan tarjih). Dalam perspektif ini, Muhammadiyah percaya bahwa perlu adanya upaya merumuskan pola pemurnian terhadap aqidah Islam. Hal ini muncul karena di masyarakat Islam Indonesia, menurut pandangan Muhammadiyah, terdapat perilaku teologis yang menyimpang dari aqidah shahiihah tersebut.⁵⁰

Dengan pandangan progresif Islam yang mendukung penyebaran ilmu pencerahan, Muhammadiyah berhasil tidak hanya mengonfirmasi dan memperkaya pemahaman mengenai ajaran keyakinan, ritual ibadah, dan moralitas umat Islam, tetapi juga berhasil melakukan reformasi dalam urusan dunia yang membawa perkembangan dalam kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Konsep Islam yang berkembang semakin memperkuat perspektif tentang tajdid, yang mencakup upaya penyucian dan dinamisasi dalam pergerakan Muhammadiyah, yang keseluruhannya bersumber dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah) untuk menghadapi perubahan zaman.⁵¹

Sedangkan Anjar Nugroho menilai, kecenderungan konservatisme alam pikiran Muhammadiyah, disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, keterjebakan Muhammadiyah terhadap aktivisme yang cenderung memperluas

⁵⁰ Dr. H. Mahsun, M.Ag, "Fundamentalisme Muhammadiyah", (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2013), Hlm.8

⁵¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua Zhawâhir Al-Afkâr Al-Muhammadiyah Li Al-Qarni Al-Tsâni", (Yogyakarta: Gramasurya, 2010), Hlm.8.

demografi dan keanggotaan. Aktivitas tersebut mengakibatkan para aktifis Muhammadiyah terlalu bersifat politis-ideologis dan apologis katimbang berfikir secara reflektif-kontemplatif dan filosofis. Kedua, peran majlis tarjih sebagai thik thank Muhammadiyah terlalu bersifat Fiqh-Oriented dan tekstual-normatif. Kecenderungan ini telah menafikan konteks perkembangan zaman dan perubahan sosial yang menghajatkan suatu ola pemikiran keislaman yang asumtif-probabilistik-pluralis. Ketiga, di tingkat aplikasi praktis, muncul truth-claim dari pensakralan produk-produk majlis tarjih seperti Himpunan Putusan Tarjih (HPT) terhadap masalah-masalah muamalah. Dan keempat, belum meluasnya tradisi berfikir empirik di kalangan anggota Majelis Tarjih.

Menurut Abdul Munir, ideologisasi gerakan Dakwah merupakan upaya untuk menyampaikan kepada individu dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia. Hal ini mencakup amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai cara dan media yang sesuai dengan norma-norma akhlak, serta membimbing pengalaman dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Dalam perkembangan terbaru, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam.

Zaman Orde Baru ini dicirikan oleh keaktifan gerakan-gerakan Islam kontemporer, termasuk yang memiliki sifat fundamentalis radikal (sebagaimana diuraikan oleh Azzumardi Azra) dan yang disebut oleh Haedar Nashir sebagai Islam Shariah, serta yang bersifat modern liberal. Dalam beragam pemikiran keagamaan kontemporer yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, salah satunya adalah gagasan tentang pluralisme atau pluralitas agama. Para pendukung pluralisme atau pluralitas agama mengacu pada tindakan Nabi Muhammad SAW. ketika memperkenalkan ajaran Islam di Madinah. Meskipun pada masa kenabian Muhammad SAW. terdapat keragaman atau pluralitas keberagamaan, hal tersebut tidak menghentikan

beliau untuk mempromosikan sikap toleransi di antara pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda.⁵²



UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁵² Dr. H. Mahsun, M.Ag, *Op,Cit.* Hlm 11-14



UIN IMAM BONJOL
PADANG